

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan BUMDes Cempaka Desa Naruwolo Kecamatan Jerebuu Kabupaten Ngada, dapat disimpulkan bahwa:

1. Prinsip Transparansi

Penerapan prinsip transparansi belum berjalan secara optimal. Selama dua tahun terakhir (2023–2024) tidak terdapat laporan keuangan yang disusun dan dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat. Keputusan strategis cenderung diambil secara elitis oleh pemerintah desa dan pengelola BUMDes tanpa melibatkan masyarakat secara aktif. Minimnya media publikasi juga menyebabkan masyarakat kekurangan akses informasi terkait pengelolaan BUMDes.

2. Prinsip Akuntabilitas

Secara administratif, BUMDes Cempaka telah memiliki struktur organisasi dan SOP, namun pelaksanaan tugas belum berjalan maksimal. Terdapat saling lempar tanggung jawab antar pengurus, pelaporan kinerja tidak dilakukan secara rutin, serta kontrol internal lemah. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas belum sepenuhnya terimplementasi dalam pengelolaan.

3. Prinsip Responsibilitas

Kepatuhan terhadap regulasi masih rendah. Laporan keuangan tidak disusun secara berkala, dan sebagian besar kegiatan operasional tidak

sesuai dengan AD/ART. Etika bisnis belum diterapkan secara konsisten, yang tercermin dalam ketidakjujuran pengelola dalam menyampaikan informasi kepada publik. Terdapat pula perbedaan persepsi antara pengurus dan masyarakat mengenai pelaksanaan usaha.

4. Prinsip Kewajaran.

Terdapat perlakuan tidak adil dalam layanan BUMDes, seperti pengecualian sanksi kepada pihak tertentu yang dekat dengan pengelola. Koordinasi internal yang lemah serta tidak dilibatkannya masyarakat dalam penetapan harga menunjukkan belum diterapkannya prinsip kewajaran secara menyeluruh dalam pengelolaan BUMDes.

5. Prinsip Kemandirian

Pengambilan keputusan masih didominasi oleh pemerintah desa dan pengelola, tanpa partisipasi masyarakat. Kemandirian finansial belum tercapai karena unit usaha yang berjalan hanya satu, sedangkan lainnya stagnan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga belum menjadi prioritas, terbukti dari pelatihan yang hanya dilakukan sekali sejak awal pembentukan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan untuk perbaikan tata kelola BUMDes Cempaka ke depan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Transparansi

Menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan secara berkala melalui forum desa, papan informasi publik, atau media sosial resmi desa.

Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan strategis melalui forum musyawarah desa yang terbuka dan partisipatif.

2. Penguatan Akuntabilitas

Melakukan pembagian tugas yang lebih jelas dan disertai evaluasi berkala atas pelaksanaan tanggung jawab masing-masing pengurus.

Menegakkan disiplin dalam penerapan SOP serta memperkuat fungsi pengawasan internal oleh pengawas BUMDes dan tokoh masyarakat.

3. Peningkatan Responsibilitas

Mendorong pelaksanaan usaha yang sesuai dengan AD/ART dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menerapkan prinsip etika dalam bisnis, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

4. Penegakan Kewajaran

Menerapkan kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif kepada seluruh masyarakat tanpa pengecualian. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penetapan harga dan kebijakan BUMDes untuk menjamin keadilan prosedural.

5. Penguatan Kemandirian

Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan manajemen, pengelolaan keuangan, dan kewirausahaan secara berkala.

Mendorong diversifikasi unit usaha BUMDes agar tidak hanya bergantung pada satu jenis layanan, serta menciptakan sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

6. Kolaborasi dan Pendampingan

Diperlukan pendampingan dari pihak kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), maupun LSM, guna membantu pembenahan manajerial dan administratif. Masyarakat juga harus didorong untuk berperan aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengelolaan BUMDes.

Dengan pelaksanaan saran-saran tersebut, diharapkan BUMDes Cempaka dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi desa yang mandiri, transparan, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Naruwolo.